TEORI EKONOMI DAN PERKEMBANGANNYA (Kuliah II)

Ekonomi Pancasila

Ada pertanyaan yang sering dilontarkan dan menjadi perdebatan nasional tentang bagaimana konsep Pancasila itu. Apakah politik ekonomi yang terjadi serakang ini masih tetap setia atau tidak dengan Pancasila dan UUD45 Beberapa pengamat menganggap bahwa politik pemerintahana kadang sebenarnya masih berdasarkan pada apa yang menjadi landasan negara tetapi dibawah para teknokrat sering menyimpang karena politik liberalisme sering dipakai sebagai pedoman.

Pembangunan yang adil dan merata

Yang menjadi permasalaha adalah apakah kita perlu untuk mengubah paradigma pembangunan kita dari prioritas ekonomi materiil ke aspek kualitas sumber daya manusia. Sebab pada kenyataanya sering terjadi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Sehingga patut dikhawatirkan pembangunan itu hanya menguntungkan sekelompok orang tertentu saja yang jumlahnya sedikit, dan belum mampu mengurangi jumlah kelompok miskin. Dan sepertinya ada yang menyalahkan bahwa pertumbuhan ekonomi itu merupakan penyebab terjadinya kesenjangan ekonomi dan sosial yang makin besar.

Pada awalnya paradigma trilogi pembangunan adalah menempatkan stabilitas nasional pada urutan pertama, kemudian pertumbuhan ekonomi dan terakhir pemerataan. Namun seiring berjalannya waktu seringkali urutannya berubah-rubah. Sehingga dalam hal ini masih ada toleransi kepada adanya kesenjangan ekonomi dan sosial yang seringkali menonjol dan seringkali malah menimbulkan permasalah besar.

Kebanyakan teori ekonomi pembangunan dari Barat tidak mengajarkan adanya keadilan sosial. Dan berdasarkan pengalaman di banyak negara, ada banyak akibat fatal dari negara-negara yang pesat pertumbuhan ekonominya tetapi melupakan pemerataan dan hasil-hasilnya menuju terwujudnya keadilan sosial.

Sebenarnya ada kelemahan-kelemahan dari teori-teori barat yang sering membuat kita keliru meanganalisis masalah-masalah ekonomi yang terjadi di negara kita.Dalam teori Barat ada model-model yang mengasumsikan faktor-faktor ekonomi sebagai tak mudah berubah.

Ada kekhasan dari falsafah bangsa Indonesia, dan seharusnya kita tidak terlalu kaku berpegang pada teori dari luar. Sepertinya pemerintaqh perlu memandang digunakannya ukuran-ukuran Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi asli bangsa Indonesia yangmenunjuk pada kebebasan tetapi sungguh-sungguh bertanggung jawab.

Potensi Ekonomi Rakyat

Ekonomi Rakyat merupakan tulang punggung ekonomi nasional yang seharusnya bisa diandalkan dan sering kurang disadari sejak terjadinya proses konglomerasi ekonomi sekitar tahun 1987-1988, di mana sepertinya kita lebih mempercayai proses konglomerasi ekonomi dan bukan koperasi yang merupakan sokoguru eknomi nasionla. Sebenarnya

ekonomi rakyat kuat daya tahannya, sedangkan sebaliknya perusahaan besar sering keropos dan bisa merepotkan pemerintah.

Menelantarkan ekonomi rakyat akan berakibat fatal dalam jangka panjang. Dan tugas utama dari pembangunan ekonomi adalah sebenarnya untuk meningkatkan daya beli rakyat. Sebab perusahaan-perusahaan besar bisa mengalami kegagalan akibat terlalu jenuhnya pasar dalam negeri yang selanjutnya sering minta kemudahan-kemudahan ekspor bagi pemasaran barang-barangnya ke luar negeri, karena harga baranya tidak mampu bersaing dengan produk negara pesaing di pasar dunia.

Jika menilik dari pasal 33 (ayat 2 dan 3) UUD 1945, sebenarnya negara yang menguasai pokok-pokok kemakmuran rakyat, harus memihak kepada kepentingan rakyat banyak, dan pasal 34 menegasikan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.Pembangunan yang mensejahterakan rakyat yang membuka peluang kepada masyarakan untuk dapat hidup adil dan makmur berdasarkan pancasila dan UUD45 memerlukan paradigma baru pemngaunan yaitu bukan sekedar mementingkan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan dengan pemerataan saja tetapi lebih tegas pertumbuhan yand dicapai melalui pemerataan (growth via equity).

Paradigma baru pembangunan ekonomi

Masalah eknomi yang sering dihadapi adalah melencengnya pelaksanaan kebijaksanaan dari yang seharusnya. Meskipun sesungguhnya kekuatan pasa sudah dibebaskan, terutama sejak deregulasi Juni 1983, dan melalui pakto 88. Ternyata kekuatan pasar yang sudah dibebaskan sekalipun tidak selalu dapat bekerja secara bebas karena berbagai hambatan. Misalnya terjadinya proteksi industri substitutsi import tertentu sering menciptakan kekuatan-kekuatan ekonomi monopoli atau oligopoli yang membangun benteng-benteng eknomi proteksi yang tidak mudah ditembus.

Selanjutnya dari berabagai ungkapan dan pendapat beberapa pakar bisa disimpulkan bahwa nampak ada penyimpangan-penyimpangan kebijaksanaan yang kini harus diluruskan lagi. Terdapat kekhawatiran kurang dihubungkannnya pembangunan ekonomi dnegan realitas ekonomi dan realitas politik. Atau lebih serius lagi dianggap kebijaksanaan-kebijaksanaan telah didasarkan pada teori-teori yang padadirinya keliru.

Teori-teori ekonomi yang keliru pada dasarnya akibat penggunaan teori-teori ekonomi yuang kita pakai memnga berasal dan dikembangkan di negara barat. Ilmuwan-ilmuwan Indonesia harus diakui belum banyak yang benar-benar berhasil mengembangkan teori-teori eknomi berdasarkan fatka-fakta empirik di Indonesia. Bahkan teori eknomi paling sederhanampun, yaitu sistem ekonomi Pancasila kebanyakan ekonom-ekonom kita kurant tertarik untuk membahasnya.

Padahal kebutuhan akan teori ekonomi tentang pembangunan ekonomi Indonesia untuk mematangkan proses pengembangan teori ekonomi tentang pembangunan Indonesia dirasakan sangat penting dan diperlukan paradigma-paradigma baru yang cukup mendesak untuk memecahkan masalah bangsa.

Menurut Mubyarto, Namun dapat juga terjadi adanya kesepakatan dengan melakukan kombinasi antara pengendalian perilaku konglomerat dengan pengembangan ekonomi rakyat. Mengembangkan ekonomi rakyat berarti adanya upaya-upaya khusus memberdayakan masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah. Apabila keduanya dikaitkan maka bisa diupayakan terwujudnya sistem ekonomi Pancasila.